



10 Peraturan Daerah Masuk Prolegda 2011

Yulianingsih

YOGYAKARTA — Memasuki triwulan kedua 2011, DPRD Kota Yogyakarta akhirnya menegesahkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kota Yogyakarta. Prolegda berisi 10 program legislasi berupa Peraturan Daerah (Perda) yang akan dibahas hingga akhir tahun.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di DPRD Kota Yogyakarta, Senin (18/4). Ketua Pansus Prolegda DPRD Kota Yogyakarta, Agung Atmodjo, menjelaskan, molornya pengesahan Prolegda akibat adanya

tarik ulur pengkajian dua Perda inisiatif dari Fraksi PDIP, yaitu Perda Kesetaran Gender, dan Perda Parkir.

"Sebagai jalan tengah, akhirnya kita sepakati untuk memasukkan 10 Perda dalam Prolegda, dan dua Perda inisiatif PDIP tadi sementara masih dalam pengkajian," terangnya.

Diakui, tarik ulur dua Perda inisiatif itu dilakukan untuk menyantolkan Perda tersebut pada produk hukum di atasnya. Sehingga diharapkan, tidak saling tumpang tindih atau bahkan bertolak belakang dengan produk hukum di atasnya.

Namun karena belum memperoleh kesepakatan, maka diputuskan dua Perda tersebut masih akan dikaji. Sementara 10 Perda inisiatif eksekutif dimasukkan dalam Prolegda yang telah disahkan.

Molornya pengesahan Prolegda jelas akan berpengaruh pada kinerja anggota dewan dalam mengeluarkan produk legislasi. Menurut Agung, 10 Perda dalam Prolegda tersebut telah dibagi dalam empat triwulan dalam pembahasan selama setahun di DPRD Kota Yogyakarta.

"Karena Prolegda baru disahkan di triwulan kedua, maka

Perda yang seharusnya dibahas pada triwulan pertama, disebut bersama Perda yang dibahas di triwulan kedua. Teknisnya kita serahkan ke Badan Musyawarah," tandas dia.

Dia menerangkan, dalam Prolegda tersebut, ada tiga Raperda yang dijadwalkan dibahas di triwulan pertama tahun 2011 (Januari-Maret). Yaitu, Perda Usaha Kecil dan Menengah, Perda Pajak Bumi dan Bangunan, dan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sedangkan Perda yang dijadwalkan dibahas di triwulan kedua (April-Juni) adalah Perda Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Izin

Mendirikan Bangunan, dan Perda Pengelolaan Lingkungan.

Pada triwulan ketiga (Juli-September) ada dua Raperda yang akan dibahas yaitu Perda Retribusi Jasa Usaha dan Perda Perubahan Perda Nomor 15 tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana. Triwulan keempat (Oktober-Desember) dibahas dua Raperda yaitu Perda Retribusi Jasa Usaha dan Perda Rencana Detail Tata Ruang.

"Kita perlu kerja keras, tetapi *draft* Raperda triwulan pertama, semua sudah siap di eksekutif sehingga pembahasan bisa dikebut," tegas Agung. ■ ed : yusuf assidiq

Dihaturkan Kepada Yth. :
 1. Walikota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			

Yogyakarta, 26 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005